

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Situasi sebelum pendaratan Jepang di ibukota Batavia (Jakarta) pada tanggal 5 Maret 1942 diumumkan sebagai “kota terbuka” yang berarti bahwa kota itu tidak akan dipertahankan oleh pihak Belanda (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 3). Operasi Jepang untuk menaklukkan Indonesia hanya memakan waktu dua bulan, Jawa jatuh pada tanggal 8 Maret 1942. Pemerintah Belanda, dengan segala kebanggaan akan sifat-sifatnya yang kuat, praktis dan efisien, lenyap dalam sekejap. Bagi pihak militer Jepang yang memerintah Indonesia, memenangkan perang merupakan prioritas di atas segala pertimbangan yang semata-mata kolonial (Reid, 1996: 15-16).

Namun pendudukan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama menyusul kealahannya dalam Perang Dunia II yang berakhir dengan menyerahnya Jerman kepada Sekutu di Eropa, serta menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 sebagai akibat dari dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu (Setyohadi, 2002: 23). Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945, kemudian ditanda tangani secara resmi tanggal 2 September 1945 di atas kapal perang Sekutu “Missouri” yang berlabuh di teluk Tokyo.

Dalam keadaan seperti itu maka dilakukanlah pernyataan kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17

Agustus 1945. Dengan demikian, bangsa Indonesia secara *de facto* telah merdeka dan berdaulat penuh, sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Namun pernyataan kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta tersebut belum dapat diterima sepenuhnya oleh beberapa negara lain, terutama pihak Sekutu, satu diantaranya adalah Belanda. Mereka bermaksud menjajah kembali dan berusaha merongrong kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia.

Situasi makin buruk ketika pasukan Sekutu yang tergabung ke dalam AFNEI (*Allied Forces for Netherland East Indie*), tiba di Indonesia pada 12 Oktober 1945. AFNEI merupakan pasukan Sekutu yang dibentuk SEAC (*South East Asia Commad*) yang bertugas untuk menjalankan perintah gabungan kepala staf Sekutu, yaitu melucuti senjata tentara Jepang, masalah tawanan perang dan masalah lainnya di Indonesia. Didalam kedatangan Sekutu tersebut ternyata NICA (pasukan Belanda), ikut menyusup masuk pada tentara Sekutu, dan bahkan memakai seragam tentara Sekutu.

Pada awalnya masyarakat Indonesia menerima kedatangan pasukan Sekutu dengan sikap terbuka. Namun setelah tahu bahwa mereka menyusupkan pasukan NICA, maka sambutan tersebut pun berubah menjadi sikap bermusuhan. Munculnya dinamika tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya revolusi kemerdekaan Indonesia.

Revolusi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945-1949 merupakan periode yang menandakan adanya perjuangan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kahin menyebutkan adanya revolusi di

Indonesia tidak terlepas dari adanya nasionalisme. Melalui semangat nasionalisme yang sudah mulai berkembang sejak awal abad ke duapuluh hingga puncaknya terjadi revolusi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, bangsa Indonesia telah berhasil menunjukkan semangat nasionalisme yang kuat. Gerakan revolusi di Indonesia menandakan bahwa masyarakat Indonesia telah mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi (Kahin, 1995:178).

Tujuan revolusi adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya. Pada masa revolusi ini, merupakan saat ketiga kalinya pihak Belanda bermaksud menguasai Indonesia, bagaimanapun kemenangan Belanda yang hampir tercapai banyak menolong untuk menggalang kebhinekaan menjadi sebuah republik kesatuan yang bersepakat terhadap apa yang ditentangnya. Dengan demikian, akhirnya pihak Belanda harus melupakan usahanya membentuk imperium baru di Indonesia (Ricklefs, 2005: 429).

Revolusi menjadi sebuah alat bagi bangsa Indonesia untuk tercapainya kemerdekaan. Revolusi Indonesia menggambarkan sebuah bentuk perlawanan terhadap penjajahan baik secara fisik maupun secara diplomasi. Revolusi yang terjadi di Indonesia bertujuan untuk mempertahankan wilayah serta kedaulatan negara Indonesia yang diwarnai dengan pertempuran-pertempuran dan perlawanan yang bersifat massal. Revolusi yang terjadi di Indonesia merupakan gerakan dari perjuangan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan menyebabkan ciri khas tersendiri dalam revolusi di Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia revolusi merupakan satu jalan yang harus ditempuh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan puncaknya terjadi pada masa 1945-1949. Rasa kebangsaan yang tinggi terhadap Indonesia telah mendorong orang-orang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dari pro republik. Banyak para pemuda yang akhirnya bergabung dengan badan-badan perjuangan rakyat, mereka bergerak maju mengusir Belanda dari Indonesia.

Informasi mengenai situasi dan kondisi politik tersebut, dengan cepat dapat tersebar ke seluruh Nusantara termasuk wilayah Priangan yang lokasinya cukup berdekatan dengan Ibu kota Jakarta. Selain itu, tersebarnya berita tersebut juga merupakan peranan dari para pemuda dan pers di Priangan. Penyebaran berita kepada masyarakat tersebut dilakukan melalui pemancar radio, penyebaran tulisan-tulisan melalui media cetak dan famplet, serta pemberitahuan secara berantai dari mulut ke mulut (Ekadjati, 1980 : 86-87).

Di Bandung sendiri menurut Soepandi dalam bukunya mengatakan bahwa berita tentang proklamasi kemerdekaan disebarkan ke seluruh Indonesia dan luar negeri yang disiarkan melalui Stasion Radio Pemancar Pos Telegraf dan Telepon (PTT) di Dayeuh Kolot Kota Bandung. Berita kemerdekaan tersebut disiarkan pada malam itu juga tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 19.00 sampai pukul 21.00 WIB, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

”Pemancar Radio Bandung pulalah yang pertama kali mengumandangkan ”*station call*” bertandas-tandas ”Radio Republik Indonesia”. Kelompok Sakti Alamsyah antara lain Hasyim Rakhman, Sofyan Ju, Sam Amir, Abdul Razak, Nona Odas Sumadilaga, R. A.

Darya, Sutarno Brotokusumo dan lain-lainnya, menyiarkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada malam itu juga tanggal 17 Agustus 1945, yakni pada pukul 19.00-20.00-21.00 waktu Jawa, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris untuk kemudian ditutup dengan lagu "Indonesia Raya" yang pada waktu itu belum lagi diresmikan menjadi lagu Kebangsaan Indonesia. Pada dasarnya kelompok ini sudah memegang senjata di tangan dan menduduki gedung radio tersebut. Selanjutnya dengan bekerjasama dengan kelompok PTT yang menangkap dan menghubungkan siaran tersebut melalui pemancar bergelombang pendek, tersiarlah Proklamasi 17 Agustus 1945 itu ke seluruh dunia pada hari itu juga di Bandung (E. Soepandi, 1980:153-154).

Dampak dari berita tersebut adalah semakin hangatnya situasi politik di Priangan, yang ditandai dengan adanya kesamaan tekad dari masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diwujudkan dengan mengadakan perlawanan bersenjata. Semangat revolusi tersebut terlihat dari antusiasnya masyarakat seluruh Indonesia dalam menyambut Proklamasi 17 Agustus 1945, diantaranya dengan ramai-ramai membentuk badan-badan perjuangan dan laskar-laskar rakyat.

Badan perjuangan adalah organisasi pemuda yang muncul secara spontan sejak awal perang kemerdekaan Indonesia (1945-1949), baik yang dibentuk oleh masyarakat ataupun oleh partai politik tertentu (Pramono, 1983:1). Sedangkan menurut Anderson, laskar bermakna satuan bersenjata di luar tentara leguler, yang secara umum berafiliasi pada kepentingan politik tertentu yang bekerja melalui gerakan bawah tanah. Namun demikian Ben Anderson menjelaskan bahwa yang dimaksud gerakan bawah tanah disini bukanlah gerakan dalam arti "pasukan gerilya", namun paling tepat dapat dilihat sebagai kerangka pemikiran ketimbang organisasi atau bahkan kelompok-kelompok. Kemudian bersama rakyat, gerakan-gerakan tersebut berubah menjadi laskar-laskar untuk membela dan

mempertahankan kemerdekaan. Suasana persatuan antara rakyat dan laskar-laskar itu begitu kental, sehingga Ben Anderson menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya laskar itulah yang sesungguhnya merupakan lambang dari rakyat bersenjata (Anderson, 1988: 98).

Semangat revolusi begitu menggebu-gebu disetiap daerah di seluruh Indonesia. Dikota-kota besar seperti Surabaya, yang tadinya nampak mati suri selama masa penjajahan kembali menemukan gairahnya, seperti yang tertulis dalam surat kabar *Soeara Asia* tertanggal 22 Agustus 1945 yang dikutip oleh Notosusanto:

“Sejak didengarnya Proklamasi Kemerdekaan di Surabaya api revolusi mulai menyala. Perubahan-perubahan drastis terjadi. Larangan menyalakan lampu di malam hari yang sudah berlangsung selama tiga tahun dan menjadikan Surabaya seperti kota mati, sejak tanggal 22 Agustus dicabut oleh *Tobu Jawa Boetai* (Komando Pertahanan Jawa Timur). Surabaya seolah-olah hidup kembali dan seluruh kota menjadi terang-benderang” (Notosusanto, 1995: 69).

Organisasi-organisasi pemuda yang dibentuk berupa badan-badan perjuangan semata-mata wadah pemersatu, sebagai alat perjuangan. Badan perjuangan atau organisasi kelaskaran yang pertama kali dibentuk di Surabaya adalah Pemuda Republik Indonesia (PRI). Organisasi kelaskaran lainnya di Surabaya adalah Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), kelompok Barisan Buruh Indonesia (BBI), Organisasi Pembela Wanita, dan masih banyak lagi (Notosusanto, 1995: 69-81).

Nampaknya semangat mendirikan berbagai organisasi kelaskaran menular ke berbagai daerah yang lain. Misalnya di Jakarta dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (Bara), dan Barisan Buruh Indonesia.

Gin Gin Junaedi, 2012

Konflik Antara Tentara Indonesia Dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Di Jawa Barat (1945-1949)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Di Padang terbentuk Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI), di Kalimantan dibentuk Pemuda Penyongsong Republik Indonesia (PPRI) dan Persatuan Rakyat Indonesia (PRI), dan di Sulawesi ada Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).

Begitu pula halnya yang terjadi di Priangan. Di Tasikmalaya, para pemuda yang pernah bergabung dalam berbagai organisasi pada masa pemerintahan Jepang, tanpa dikomando segera membentuk kelompok-kelompok perjuangan. Misalnya, Ahmad Danumihardja dan Soleh Sumantri, mantan anggota PETA di Tasikmalaya, menghimpun rakyat Tasikmalaya ke dalam kelompok yang bermarkas di dekat Gunung Singa. Upaya tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, sehingga banyak pemuda ikut bergabung (Warjita. 1989: 11).

Di Garut, mantan Komandan PETA yang terdiri atas *shodanco* dan *chudanco*, seperti Yusuf, Umar Wirahadikusumah, dan Abdullah Saleh melatih 230 orang pemuda yang berasal dari 23 kecamatan di kabupaten Garut. Latihan tersebut dilakukan secara bergelombang selama satu bulan. Demikian juga di daerah lain, terbentuk berbagai pasukan perjuangan secara spontan (Ekadjadi 1980: 106).

Di Sumedang, dibentuk Gabungan Gerilya Djawa Barat Oetara (GGDBO) yang memiliki pasukan penggempur (*mobielle troep*). GGDBO kemudian membangun beberapa pos pertahanan di beberapa daerah yang strategis, yaitu di sekitar Sindangjati, Sumedang Utara, Tanjungkerta, Conggeang, Cipunagara, Ciuyah, Cimalaka, dan perbatasan Sumedang-Bandung Utara. Pos pertahanan ini

bertujuan untuk mendeteksi pergerakan tentara Belanda sehingga dapat diketahui lebih awal oleh para pejuang (Lubis, 2008: 242)

Setelah terbentuknya badan-badan perjuangan di Priangan, ternyata sering terjadi konflik di antara BKR dan badan-badan perjuangan, ataupun konflik di antara sesama badan perjuangan. Baik anggota BKR maupun badan-badan perjuangan menganggap diri mereka sebagai pejuang yang berhak dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara. Adanya perbedaan anggapan tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya kesalahpahaman antara tentara dan badan-badan perjuangan yang ada di Priangan (Djamhari, 1945: 4).

Ulf Sundhaussen dalam bukunya mengatakan bahwa salah satu persoalan yang menjadi pokok perselisihan antara laskar-laskar dan tentara adalah kedudukan organisasi kelaskaran itu sendiri. Tugas untuk menjaga keamanan dalam negeri merupakan tugas pokok tentara reguler yang berada di bawah komando Markas Besar Tentara. Artinya tidak diperbolehkan adanya kekuatan militer lain kecuali Angkatan Kepolisian. Terlebih karena pernyataan Oerip Sumohardjo yang sedikit menyinggung laskar-laskar rakyat:

“Laskar rakyat harus merupakan organisasi-organisasi kerakyatan. Tugas laskar rakyat adalah membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yakni sebagai organisasi petani, organisasi buruh, yang mempertahankan desa mereka sendiri, pabrik mereka sendiri, kantor dan ladang mereka sendiri, dan sebagai organisasi tempur yang merupakan organisasi pembantu pendamping TKR (Sundhaussen, 1986: 41).

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa tentara menganggap mereka para laskar rakyat tidak lebih dari hansip atau sekarang dikenal dengan linmas, yakni

pasukan di garis belakang. Masalah lainnya yang memicu konflik adalah adanya perebutan persenjataan diantara kedua belah pihak. Apabila tentara dapat mengusahakan diberlakukannya larangan terhadap organisasi kelaskaran, atau memaksakan peleburan mereka ke dalam tentara reguler, maka persaingan mencari senjata di antara keatuan-kesatuan yang reguler dan yang tidak reguler akan segera berakhir. Akan tetapi pada kenyataannya, sering terjadi bentrokan antara Tentara reguler dengan laskar dalam usaha untuk saling melucuti senjata.

Tentara dan laskar juga bersaing dalam memperoleh dukungan rakyat. Dalam persaingan mencari dukungan rakyat itu pihak tentara sering berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan. Dalam suasana revolusi dimasa itu golongan-golongan penduduk yang besar jumlahnya menganggap laskar sebagai lebih dekat dengan mereka dibandingkan dengan tentara reguler yang lebih elitis. Selain itu, dalam banyak kesempatan tentara reguler tampaknya kurang bertekad untuk melawan Belanda, karena mereka merasa lebih berkewajiban untuk melaksanakan perintah pihak pemerintah (Sundhaussen, 1986: 29).

Untuk mengatasi kesalahpahaman serta menghindari terjadinya konflik yang lebih besar dan lebih kompleks, maka dibentuklah suatu wadah perjuangan yang akan mengkoordinasikan berbagai kegiatan maupun gerakan yang dilakukan oleh badan-badan perjuangan di Priangan yaitu membentuk MPPP (Majelis Persatuan Perjuangan Priangan). Pada awalnya MPPP ini dibentuk untuk menyatukan tujuan antara para pejuang yang tergabung kedalam laskar-laskar perjuangan dengan Tentara Indonesia, sehingga kemerdekaan Indonesia yang telah diraih bisa dipertahankan dari rongrongan penjajah yang hendak menduduki

kembali Indonesia. Namun harapan tersebut ternyata tidak sejalan dengan kenyataannya, karena sejak dibentuknya MPPP ini malah semakin menimbulkan perseteruan yang tajam antara laskar-laskar perjuangan dan Tentara Indonesia. Dari hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah sebabnya MPPP tidak dapat bekerjasama dengan Tentara Indonesia, bahkan sampai menimbulkan sebuah konflik? Permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Konflik Antara Tentara Indonesia Dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) Pada Masa Revolusi Kemerdekaan di Jawa Barat (1945-1949)”.

Dalam penelitian ini, pemilihan kurun waktu 1945 sebagai titik awal pembahasan karena tahun 1945 merupakan awal dibentuknya Tentara Indonesia dan MPPP, keduanya memiliki tujuan yang sama namun berbeda dalam cara mencapai tujuannya. Tahun 1949 dijadikan akhir dalam pembahasan karena pada tahun tersebut merupakan akhir kekerasan, sebagaimana dampak dari konflik yang terjadi selama empat tahun belum berhasil diselesaikan. Sedangkan penggunaan istilah Tentara Indonesia dalam penelitian ini adalah untuk menyebutkan kekuatan militer Indonesia yang sering berubah nama selama kurun waktu pembahasan penelitian ini.

1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan di atas, peneliti telah merumuskan masalah utama dalam penelitian ini, yaitu ”Mengapa terjadi konflik di antara Tentara Indonesia dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP)?”

Gin Gin Junaedi, 2012

Konflik Antara Tentara Indonesia Dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Di Jawa Barat (1945-1949)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka rumusan masalah di atas harus dibatasi dengan pembatasan masalah. Pembatasan tersebut dituangkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Tentara Indonesia dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) pada masa awal revolusi kemerdekaan?
2. Bagaimana garis komando antara Tentara Indonesia dan MPPP?
3. Mengapa Tentara Indonesia dan MPPP tidak dapat bekerjasama dalam menghadapi Sekutu pada masa revolusi kemerdekaan?
4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut terhadap arah perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai seputar konflik yang terjadi di dalam tubuh badan-badan perjuangan dan kelaskaran di Priangan yang tergabung kedalam suatu wadah bernama MPPP, dengan Tentara Indonesia. Adapun secara khusus adalah untuk:

1. Menjelaskan latar belakang sejarah terbentuknya Tentara Indonesia dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) pada masa awal revolusi kemerdekaan.
2. Menjelaskan bagaimana garis komando antara Tentara Indonesia dan MPPP.
3. Menguraikan sebab-sebab mengapa Tentara Indonesia dan MPPP tidak dapat bekerjasama dalam menghadapi Sekutu pada masa revolusi kemerdekaan.

4. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut terhadap perjuangan kemerdekaan di Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkaya penulisan sejarah tentang perjuangan rakyat Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan yang terjadi di daerah Priangan, Jawa Barat.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian sejarah mengenai Konflik Antara Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) Dan Tentara Indonesia Pada Masa Revolusi Kemerdekaan di daerah Jawa Barat pada kurun waktu tahun 1945 hingga tahun 1949.
3. Sebagai bahan pengayaan materi pelajaran sejarah kelas IX dengan Standar Kompetensi: Memahami usaha mempertahankan kemerdekaan, dan Kompetensi Dasar: Mengidentifikasi usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan secara lebih rinci mengenai latar belakang masalah. Di sini, penulis memaparkan alasan mengapa memilih tema seputar konflik antara Tentara Indonesia dengan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan pada kurun waktu 1945-1949. Dalam pembahasan skripsi ini Penulis membatasi permasalahan mengenai permasalahan-permasalahan apa yang

dikaji oleh Penulis berdasarkan tema, agar nantinya pembahasan tidak melebar. Dijelaskan juga tentang tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang Penulis angkat. Metode penelitian secara garis besar beserta pendekatan dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga dibahas secara jelas, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai kajian literatur secara analitis dan kritis yang berkaitan dengan tema skripsi penulis. Penulis akan menjelaskan mengenai sumber-sumber yang akan digunakan oleh penulis dalam mengkaji permasalahannya. Sumber-sumber yang penulis dapatkan berupa buku-buku maupun artikel di internet yang digunakan sebagai pembanding dan penunjang (sumber sekunder) yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan secara komprehensif mengenai langkah-langkah serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan. Semua prosedur serta tahapan-tahapan penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir diuraikan secara terperinci. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam memberikan arahan dalam pemecahan mengenai permasalahan penelitian yang akan dikaji. Adapun langkah-langkah penelitian sejarah yang dimaksud adalah pertama heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber sejarah. Langkah kedua adalah kritik terhadap sumber yang telah diperoleh, baik kritik intern maupun kritik ekstern. Kritik intern digunakan untuk melihat dan menguji dari dalam mengenai reliabilitas dan kredibilitas isi dan sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Sedangkan kritik ekstern digunakan

untuk menilai otentitas dan integritas dari sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Langkah ketiga adalah penulisan sejarah atau historiografi. Pada tahap ini, ada tiga proses yang harus dilalui oleh Penulis sebagai peneliti sejarah. Ketiga proses itu adalah penafsiran, penjelasan (eksplanasi), dan penyajian (eksposisi).

Bab IV Merupakan pembahasan dari penelitian ini dengan judul Antara Tentara Indonesia Dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Peneliti menganalisis serta merekonstruksi data-data serta fakta yang telah ditemukan di lapangan. Tentunya pembahasan di sini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan di awal. Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang proses terbentuknya badan-badan perjuangan dan kelaskaran di Priangan pada masa revolusi Indonesia, latar belakang proses terbentuknya Tentara Indonesia dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan, faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara Tentara Indonesia dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan, proses berlangsungnya konflik antara Tentara Indonesia dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan, serta menguraikan dampak adanya konflik antara Tentara Indonesia dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan tersebut terhadap arah perjuangan menghadapi Sekutu pada masa awal kemerdekaan di Jawa Barat. Pada bab ini diuraikan juga mengenai jawaban-jawaban permasalahan penelitian.

Bab V Kesimpulan, pada dasarnya dalam bab ini dituangkan interpretasi penulis setelah menganalisis hasil penelitian tersebut. Bab ini bukan merupakan rangkuman penelitian, melainkan hasil pemahaman penulis dalam memecahkan permasalahan.